

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar keempat di dunia dilihat dari segi jumlah penduduk setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Pada tahun 2022 penduduk Indonesia berjumlah 275 juta jiwa. Mayoritas populasi penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa sekitar 59 persen dari total penduduk, hanya menempati 7,0 persen wilayah dari seluruh Indonesia. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, wilayah administrasi Pemerintah Republik Indonesia terbagi menjadi 37 provinsi, dan jumlah wilayah administrasi tingkat bawah juga bertambah menjadi 416 wilayah, 98 kota, 7281 kecamatan-wilayah, dan 83.794 desa/kelurahan. (BPS, 2023).

Populasi penduduk sebesar ini membuat Indonesia memiliki banyak sekali persoalan-persoalan rumit yang terjadi di masyarakat seperti kemacetan, kemiskinan, dan lain-lain. Kemiskinan dan ketidaksetaraan selalu menjadi topik sensitif untuk setiap negara, terutama di Indonesia. Sebagaimana penjelasan dari Hassan (2014); Wu et al. (2015); Yuheng et al. (2016) yaitu, “Sebagai negara berkembang, kemiskinan menjadi laten dan masalah sosial aktual yang terjadi di tengah masyarakat.” Dikatakan bahwa masyarakat jatuh ke dalam garis kemiskinan apabila pendapatannya tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup pokok seperti pangan, sandang dan lain sebagainya. Garis kemiskinan menetapkan batasan tertentu mengenai pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dapat menghambat pembangunan suatu bangsa,

yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak manusia. Akibat situasi kemiskinan ini, berdampak terhadap eksistensi masyarakat (*multiplier effects*) dalam tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh.

Menurut Badan Pusat Statistik (2023), proporsi penduduk berpendapatan rendah pada September 2022 berjumlah 26,36 juta jiwa. Angka tersebut bertambah 0,20 juta jiwa terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 juta jiwa terhadap September 2021. Rasio penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 7,50%. Jumlah tersebut meningkat menjadi 7,53% pada September 2022.



Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2022

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Menurut Wahyu (2009), Ada dua jenis kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut yaitu tidak ada seorangpun yang mampu mengurangi kebutuhannya. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan fenomena yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang berujung pada

ketimpangan pendapatan. Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk turun tangan di setiap permasalahan yang dialami rakyatnya.

Pencapaian kesetaraan kesempatan sosial berasal dari perubahan standar hidup yang sebelumnya berbeda. Perubahan ini terjadi melalui pembangunan. Kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara. Hal ini terlihat pada dasar negara Pancasila yang berdasarkan pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persoalan serius terkait perpecahan sosial tidak hanya terjadi di wilayah utara, namun konsep sosialisasi juga ada dalam konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kebijakan sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang mengatur urusan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan pernyataan Marshall (1965) yang mengatakan:

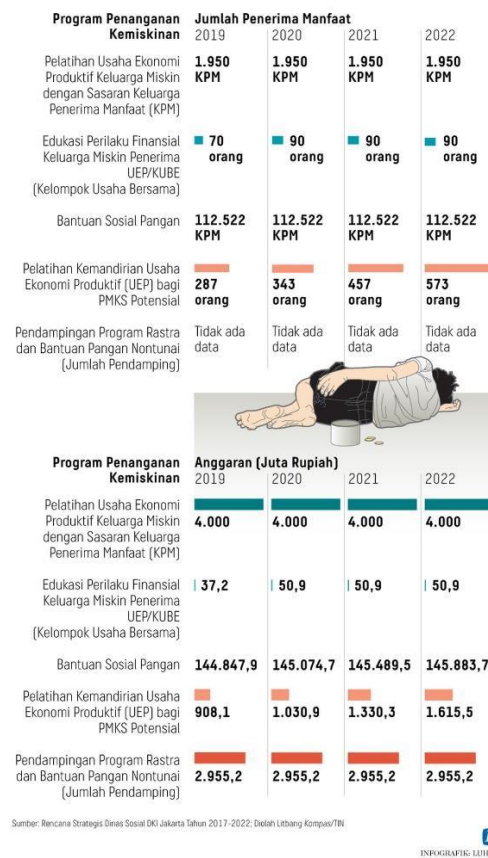
“Makna “kebijakan” pada kata “kebijakan sosial” adalah “kebijakan publik”, sedangkan makna “sosial” merujuk pada bidang atau sektor yang menjadi garapannya, yakni bidang kesejahteraan. Kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan.”

Kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, seperti perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir dan pembangunan infrastruktur. Namun gejala kemiskinan

di Indonesia belum sepenuhnya bisa teratasi. Menurut Anderson (1979), kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan diantara berbagai alternatif yang ada. Menurut Hugwood & Gunn (1998); Hayat (2017), program pemerintah merupakan bagian dari kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik formal maupun informal, merupakan suatu kebijakan.

Pemerintah sudah melakukan banyak program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan atau program yang dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diantaranya Bantuan Langsung Tunai atau sering disebut BLT. Program ini dilaksanakan karena adanya kebijakan tentang kenaikan BBM. Selain program Bantuan Langsung Tunai terdapat pula Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Program ini ditujukan mengatasi permasalahan kesehatan dan bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dengan cara menjamin mereka dalam hal pengobatan secara gratis. Selain kedua program tersebut terdapat juga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Target dan Anggaran Sejumlah Program Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial DKI Jakarta 2019-2022



Gambar 1.2 Target dan Anggaran Program Penanganan Kemiskinan DKI Jakarta 2019-2022

Sumber : Rencana Strategis Dinas Sosial DKI Jakarta Tahun 2017-2022

Upaya pengentasan warga dari kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial atau bansos pada kelompok rentan hingga kini belum menyentuh seluruh penduduk miskin di DKI Jakarta. Bansos yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terbatas oleh kuota dan anggaran yang tersedia (Nababan, 2022).

Tiga dari sekian banyak program pemerintah yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak sesuai dengan yang diharapkan, banyak menimbulkan kekecewaan dan banyak kendala yang ditemukan di lapangan terkait penyaluran bantuan program tersebut. Menanggapi hal tersebut maka pemerintah

mengeluarkan kebijakan program baru dalam pengembangan sistem perlindungan sosial dengan cara membantu rumah tangga miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Program tersebut dinamakan Program Keluarga Harapan atau sering disebut PKH. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin (KM), atau dalam istilah internasional dikenal dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT). PKH tidak sama dengan bantuan langsung tunai (BLT) sebelumnya dan bukan merupakan program lanjutan dari program-program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak.

Pelaksanaan PKH di Indonesia dimulai tahun 2007, dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada KM untuk meningkatkan kualitas hidup melalui perubahan perilaku terhadap pendidikan dan kesehatan serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. PKH juga dimaksudkan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga (dampak konsumsi langsung), sekaligus meningkatkan investasi bagi generasi masa depan. Target sasaran penerima adalah Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) atau kelompok masyarakat berada pada kluster 1 (satu). Mulai tahun 2012, calon peserta PKH adalah rumah tangga/keluarga dengan peringkat kesejahteraan tujuh persen (7%) terendah (Salim et al., 2022).

Program Keluarga Harapan (PKH) membuka akses bagi keluarga miskin khususnya ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, Keluarga dengan penghasilan rendah didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementaritas secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Tabel 1.1 Kriteria Penerima PKH

PROGRAM KELUARGA HARAPAN		
Pelayanan yang diberikan		Kriteria
1.	Pendidikan	Anak yang berusia 7-15 tahun dan terdaftar pada satuan Pendidikan.
2.	Kesehatan	Anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan nifas.
3.	Kesejahteraan Sosial	Lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan disabilitas berat.

Sumber : Pedoman Pelaksanaan PKH Kemensos, 2021

Upaya dalam peningkatan efektivitas pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) diperlukan adanya sinkronisasi dan koordinasi antar seluruh instansi terkait, mulai dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, mulai dari perencanaan sampai implementasinya dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, maupun pihak lain yang terkait. Lembaga atau badan tersebut bertanggung jawab untuk menyalurkan dan menjamin efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

Faktor penunjang keberjalanan dalam program PKH yaitu peran dari tim pendamping PKH. Dalam pelaksanaannya setiap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menerima dana bantuan didampingi oleh pendamping dalam pengalokasian dana yang telah didapatkan agar tepat pada sasaran yaitu untuk pendidikan dan kesehatan. Peran pendamping PKH menjadi sangat penting karena mayoritas penerima dana PKH merupakan RTSM yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga membutuhkan fasilitas pendampingan. Proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH merupakan agenda rutin yang harus dilakukan sebagai upaya mengarahkan RTSM agar tepat dalam penggunaan dana bantuan tersebut.

Tabel 1.2 Perkembangan Penerima PKH di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Penerima PKH (dalam juta)
1.	2018	10
2.	2019	10,3
3.	2020	10
4.	2021	10

Sumber : Indonesian Journal of Public Policy Review Vol 20. (2022)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa di Indonesia jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami kestabilan yaitu tetap pada angka 10 juta jiwa, akan tetapi memiliki anggaran yang berbeda disetiap tahunnya seperti pada tahun 2018 anggaran yang dikeluarkan untuk realisasi bantuan PKH sebesar 17,5 trilliun, tahun 2019 anggaran untuk PKH sebesar 32,65 trilliun, sedangkan di tahun 2020 anggaran PKH yang dikeluarkan sebesar 37,4 trilliun. Besaran anggaran PKH dapat berubah-ubah sesuai dengan jumlah masyarakat penerima bantuan.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta sebesar 494,93 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2024). Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah administrasi di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi sasaran pelaksanaan PKH oleh Kementerian Sosial. Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur dibagi ke

dalam 10 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, Makasar, Kramatjati, Jatinegara, Duren Sawit, Cakung, Pulogadung dan Matraman. Jakarta Timur dihadapkan pada berbagai persoalan ekonomi dan kependudukan. Kecamatan Jatinegara menjadi wilayah dengan jumlah warga miskin terbanyak di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.



Gambar 1.3 Tingkat Kemiskinan Kecamatan Jakarta Timur Tahun 2022

Sumber : Dinas Sosial Kota Jakarta Timur, 2022 diolah oleh peneliti

Dikutip dari Kompas.com, Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Timur, Ridwan, mengatakan bahwa jumlah penerima PKH di Kecamatan Jatinegara sebesar 4.558 kepala keluarga, sementara di Kecamatan Cakung sebesar 3.913 kepala keluarga. . Kemudian disusul Kecamatan Pulogadung (2.402), Matraman (2.202), Cipayung (2.093), Duren Sawit (2.071). Lalu ada Kramatjati (1.873), Pasar Rebo (1.767), Makasar (1.750), dan terakhir Ciracas (1.608). Jumlah rumah tangga penerima

PKH itu bisa bertambah sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Program Keluarga Harapan diselenggarakan pertama kali di Jakarta Timur pada tahun 2010. Kelurahan Cipinang Besar Selatan merupakan salah satu wilayah di Jakarta Timur yang mendapatkan Program Keluarga Harapan. Daerah ini berdekatan dengan Banjir Kanal Timur (BKT) dengan jumlah populasi penduduk sebesar 44,18 yang terdiri dari 10 RW dan 128 RT. Mata pencaharian masyarakat sekitar Kelurahan Cipinang Besar Selatan adalah pegawai pemerintah, pegawain swasta, pedagang, wiraswasta, buruh harian lepas, pemulung, bahkan ada yang tidak bekerja sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan primer.

Peserta PKH memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan agar dapat mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, guna mencapai perubahan perilaku keluarga yang lebih baik. Program Keluarga Harapan yang telah dilaksanakan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan sudah berjalan baik, namun masih terdapat beberapa masalah atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan program ini.

Pemerintah melalui BPS (Badan Pusat Statistik) memiliki 14 Kriteria Kemiskinan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), yaitu :

“(1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang, (2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan, (3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester, (4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain, (5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, (6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/ air hujan, (7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah, (8) Hanya mengkonsumsi

daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu, (9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun, (10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari, (11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik, (12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan < Rp. 600.000,- per bulan, (13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD, dan (14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,-seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.”

Melihat kriteria di atas, maka masyarakat Kelurahan Cipinang Besar Selatan dapat digolongkan masyarakat miskin dan berhak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 1. 3 Jumlah Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kecamatan Jatinegara Tahun 2023

No	Kelurahan	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Jumlah
1.	Bidara Cina	633	690	632	1.175	3.130
2.	Cipinang Besar Selatan	649	667	600	1.106	3.022
3.	Kampung Melayu	553	629	573	1.056	2.811
4.	Cipinang Besar Utara	593	622	567	996	2.778
5.	Rawa Bunga	463	509	464	858	2.294
6.	Cipinang Muara	501	508	452	823	2.284
7.	Cipinang Cempedak	321	361	324	581	1.587
8.	Bali Mester	186	193	174	328	881

Sumber : Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur

Berdasarkan tabel 1.3, jumlah penerima bantuan sosial PKH di Kecamatan Jatinegara tahun 2023, Kelurahan Cipinang Besar Selatan menduduki posisi kedua dengan jumlah 3.022 KPM PKH. Sedangkan untuk posisi pertama dengan jumlah penerima bantuan sosial PKH terbanyak berada di Kelurahan Bidara Cina sebanyak

3.130 KPM PKH. Kemudian disusul oleh Kelurahan lainnya yaitu Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kelurahan Rawa Bunga, Kelurahan Cipinang Muara, Kelurahan Cipinang Cempedak, dan terakhir Kelurahan Bali Mester.

Tabel 1. 4 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kecamatan Jakarta Timur Tahun 2022

Nama Kelurahan	Jumlah DTKS
Bali Mester	3310
Bidara Cina	12847
Cipinang Besar Selatan	13891
Cipinang Besar Utara	18025
Cipinang Cempedak	8514
Cipinang Muara	11975
Kampung Melayu	14711
Rawa Bunga	7407

Sumber : <https://satudata.jakarta.go.id/>

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Data DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Tabel 1.4 di atas, Kelurahan Cipinang Besar

Selatan memiliki sebanyak 13.891 masyarakat yang terdaftar dalam DTKS. Namun seringkali DTKS ini mengalami hambatan karena masih banyaknya data masyarakat Kelurahan Cipinang Besar Selatan yang tidak sinkron dengan data di Disdukcapil, penggunaan data penerima bantuan sosial banyak yang belum terupdate dan data yang ditetapkan Kementerian Sosial masih tidak tepat sasaran.

Permasalahan pertama ditemukannya beberapa keluarga yang dari segi finansial sudah masuk dalam kategori Sejahtera namun masih menerima bantuan PKH sedangkan masih banyak masyarakat/keluarga yang memprihatinkan dan layak dibantu namun justru tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Permasalahan kedua yang dihadapi yaitu adanya masyarakat yang terbuai dengan dana yang diberikan oleh pemerintah, seakan-akan pemerintah memberikan dana tersebut secara cuma-cuma dan dapat dipakai untuk keperluan apa saja seperti banyak masyarakat yang setelah mendapatkan dana PKH masyarakat membeli elektronik baru seperti televisi, handphone, kulkas, dan keinginan pribadi lainnya.

Permasalahan ketiga yaitu kurangnya informasi mengenai PKH, banyak masyarakat Kelurahan Cipinang Besar Selatan yang salah paham mengenai bantuan PKH. Mereka mengira bahwa dengan mereka mendaftar bantuan PKH maka akan mendapatkan bantuan tersebut. Hal tersebut belum tentu terjadi, karena diterima atau tidaknya tergantung dari kriteria penerima PKH dan kriteria miskin serta yang ditentukan oleh Kementerian Sosial.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, sasaran program PKH yang telah diberikan kepada masyarakat Kelurahan Cipinang Besar Selatan adalah masyarakat

rentan miskin agar mampu meningkatkan pendidikan dan kesehatannya. Standar dan sasaran PKH itu sendiri sudah ditetapkan oleh pusat, jadi saat pelaksanaan di daerah hanya tinggal menjalankan program ini sebagaimana mestinya. Proses PKH ini diawali dengan pemilihan dan penetapan peserta PKH. Dimana datanya itu langsung dari pusat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) jadi para pelaksana program tidak memiliki kewenangan untuk menambah atau mengurangi penerima PKH. Setelah pemilihan peserta, petugas mengecek langsung ke lapangan apakah benar data tersebut sudah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Pelaksanaan pendampingan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan menemui beberapa kendala. Faktor penghambat atau kendala dalam penelitian ini dibedakan dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menjadi kendala yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai makna dari PKH dan tidak adanya perubahan pola pikir (*mindset*) menuju keluarga sejahtera. Faktor eksternal yang menjadi kendala adalah penginformasian dari pusat yang sifatnya mendadak yang menyebabkan hasil yang dicapai kurang maksimal. Serta kendala teknis yang terjadi pada saat pendataan dan penyaluran bantuan sosial dan komplementer.

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, penelitian ini didasarkan pada Teori Pengukuran Efektivitas Program yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno (2010) terdiri dari lima indikator, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keberjalanan PKH tersebut dapat menyejahterakan masyarakat, terutama masyarakat sekitar Kelurahan Cipinang Besar Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang dapat disimpulkan dari latar belakang di atas, antara lain:

1. Jumlah penerima PKH di Kelurahan Cipinang Besar Selatan sangat tinggi
2. Data DTKS masih banyak yang tidak sinkron dengan data Disdukcapil.
3. Penerima bantuan sosial PKH masih belum tepat sasaran.
4. Pemahaman masyarakat terhadap pemaknaan PKH masih belum berjalan baik.
5. Penggunaan dana bantuan PKH yang tidak sesuai dengan pedoman PKH.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang akan diteliti, terdapat dasar dari penelitian yang dijelaskan dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan hal yang akan dicapai dari sebuah penelitian sejak dimulainya proses penelitian, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.
2. Mendeskripsikan dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis, dan kemampuan penulisan karya ilmiah dengan berpedoman pada kajian teori yang didapatkan dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Diponegoro.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini digunakan untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik terkait hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu sosial.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian untuk tahap berikutnya, terutama yang berminat mengkaji tentang keefektifan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4.3 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian berdasarkan hasil dari proses pembelajaran selama perkuliahan sehingga materi yang dipaparkan di dalam penelitian ini didasari oleh materi yang diajarkan di dalam perkuliahan serta menambah wawasan dan pengalaman untuk melakukan penelitian.

2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengentaskan masalah kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat penerima manfaat

khususnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang kebijakan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan aturan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan supaya beban masyarakat miskin tidak terlalu berat dalam memenuhi kebutuhannya.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh orang sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian ini untuk memberikan penjelasan bahwa penelitian ini tidak memplagiasi penelitian sebelumnya. Berikut adalah penelitian terdahulu berupa beberapa artikel yang termuat dalam jurnal-jurnal.

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Jurnal	Judul Penelitian	Metode	Teori	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	Peneliti : Suriyani, Erna. (2023). Jurnal : International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS) Vol. 2 Issue 1.	The Effectiveness of The Family Hope Program on The Welfare of Beneficiary Families in Banjarmasin City.	Kualitatif	Pengukuran efektivitas program menurut Edy Sutrisno (2010:125-126), yaitu: 1. Pemahaman program 2. Tepat sasaran 3. Tepat waktu 4. Tercapainya tujuan 5. Perubahan Nyata	Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Program Keluarga Harapan ini dilihat dari pengetahuan penerima manfaat tentang tujuan program tersebut sudah cukup efektif. Pola pikir, perubahan perilaku, dan kemandirian penerima manfaat sudah mulai berubah lebih baik. Dilihat dari bantuan biaya praktikum, masyarakat sangat terbantu dengan adanya program ini sehingga dapat meringankan beban mereka khususnya bagi yang memiliki anak sekolah. Pada komponen pendampingan, sudah berjalan efektif karena keluarga penerima manfaat dapat mengakses pelayanan	Penelitian ini memiliki fokus yang hampir sama dengan lokus yang berbeda. Selain itu peneliti tidak menjelaskan mengenai hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

					kesehatan. PKH cukup efektif dalam mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan dari masyarakat penerima manfaat.	
2.	Peneliti : Wahid Abd., Juanda Nawawi, Nurlina. Jurnal : Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran Vol. 7 No. 1. (2021).	The Effectiveness of the Implementation of the Family Hope Program in North Sinjai District.	Kualitatif	Pengukuran efektivitas program menurut Martani dan Lubis dalam Masruri (2017:369), yaitu: 1. Pendekatan sumber (input); 2. Pendekatan proses; 3. Keberhasilan program.	Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Harapan Keluarga masih belum efektif karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih menggunakan data lama dan sosialisasi pendamping PKH kepada perangkat desa mengenai verifikasi komitmen keluarga dengan waktu yang rentan terlalu lama yaitu setahun sekali.	Penelitian ini memiliki fokus yang hampir sama dengan lokus yang berbeda. Terdapat perbedaan pada teori yang digunakan.
3.	Peneliti : Iskandar Didik, Ramlawati Jabbar.	Bureaucratic Governance Effectiveness In Implementation Family Hope	Kualitatif	Indikator Efektivitas Pemerintah menurut Steers (1985), yaitu: 1. Produksi; 2. Efisiensi; 3. Kepuasan;	Berdasarkan hasil penelitian, birokratis tata kelola dalam pelaksanaan PKH di Kota Palopo belum sepenuhnya berjalan efektif. Pada indikator produksi, program ini masih	Penelitian ini memiliki fokus yang hampir sama dengan lokus yang berbeda. Selain itu terdapat perbedaan teori yang digunakan

	Jurnal : Jurnal Sosial dan Politi Al Qisthi (JAQ) Vol. 11 No. 2. (2021).	Program (PKH) In Palopo City		4. Adaptasi; 5. Pengembangan.	dikatakan kurang dan perlu ditingkatkan lagi untuk memenuhi kebutuhan, tidak hanya anggota organisasi tetapi juga untuk objek program atau KPM-PKH. Dalam hal efisiensi, input atau input dari organisasi tidak sepenuhnya selaras dengan output yang dihasilkan. Kepuasan dalam pelaksanaan program belum dapat memberikan hasil yang optimal.	oleh peneliti.
4.	Peneliti : Chamid Sutikno, Ariesta Amanda, Misbahudin Jurnal : JURNAL INOVASI DAERAH Vol. 01 No 02.	Evaluasi Program Keluarga Harapan Di Desa Cipete, Kecamatan cilongok, Kabupaten Banyumas	Kualitatif	Evaluasi Masukan menurut Mc Combs, Maxwell E. and Shaw, Donald L. 2019 yaitu: 1. Tugas dan fungsi UPPKH 2. Tugas dan fungsi operator PKH dan pendamping 3. Kepesertaan PKH 4. Adanya peningkatan	Berdasarkan hasil penelitian, Evaluasi <i>context</i> (konteks) yang selama ini dilaksanakan secara teknis maupun aturan harus lebih ditingkatkan terhadap pengawasan oleh para pendamping supaya dapat mencapai kebutuhan yang sudah sesuai dengan kebutuhan dilapangan seperti materi model, sehingga mayoritas KPM sudah sudah cukup baik dibuktikan dengan analisis kebutuhan yang sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan, materi modul yang sudah sesuai	Penelitian ini memiliki fokus yang hampir sama dengan lokus yang berbeda. Selain itu terdapat perbedaan teori yang digunakan oleh peneliti.

	(2022).			prestasi siswa dan reaksi penerima terhadap program PKH	dengan kebutuhan masyarakat sehingga mayoritas KPM sudah mengetahui mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dan memiliki tujuan program kegiatan yang sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi input (masukan) harus mampu melaksanakan monitoring dan pembinaan bagi para kelompok penerima manfaat agar mampu membangun pola hidup yang produktif. Evaluasi <i>process</i> (proses) dan Evaluasi <i>product</i> (hasil) selama ini yang berjalan masih harus ditingkatkan dengan upaya pelatihan dan keterampilan agar para kelompok penerima manfaat lebih berdaya dalam hal sosial dan ekonomi Selanjutnya perlu adanya pelaksanaan pemutakhiran data secara berkala, karena masih ada penerima bantuan PKH yang menerima bantuan belum sesuai dengan kondisi terkini, dan masih terdapat masyarakat	
--	---------	--	--	---	---	--

					miskin yang belum mendapatkan bantuan dari PKH, pendamping PKH perlu mengedukasi kembali masyarakat terkait dengan pendidikan kewirausahaan dan pola hidup yang lebih produktif untuk mencapai masyarakat yang mandiri dan mata rantai kemiskinan dapat terputus secara bertahap	
5.	Peneliti : Sa'adah Lailatus, Rizky Amaliyatuz Sa'adah. Jurnal : International Journal Of Social And Management Studies (IJOSMAS) Vol. 2 No. 3. (2021).	Analysis Of Poverty Treatment Programs Of The Government And Find Matra To Community Welfare (Case Study of Business Facilities for Poor Female Heads of Households in Perak	Kualitatif	Ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan menurut Todaro dan Stephen C. Smith, yaitu: 1. Tingkat kebutuhan dasar; 2. Tingkat kehidupan; 3. Memperluas skala ekonomi dan	Berdasarkan hasil penelitian tentang pemberdayaan perempuan melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Program Keluarga Perempuan Miskin di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang dimulai pada tahun 2020 dengan tujuan mengentaskan kemiskinan, dapat dikatakan belum efektif secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena program KRTP yang penyalurannya prosesnya cukup lama, memakan waktu hampir 1 tahun dan sebagian dari mereka tidak	Penelitian ini memiliki fokus yang hampir sama dengan lokus yang berbeda.

		Subdistrict).		ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.	memiliki usaha dan tidak mendapatkan pelatihan khusus atau pendampingan Namun demikian, program KRTP mampu memberikan dampak yang dirasakan oleh penerima bantuan Rumah Tangga Wanita Miskin Kecamatan Perak yaitu berkembangnya usaha baru yang berdampak pada peningkatan pendapatan usaha, dan dapat meningkatkan kemandirian seseorang. Pemberdayaan program Jalin Matra berfokus pada kepala keluarga Perempuan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.	
6.	Peneliti : Ahmad Yasir,dkk. Jurnal : Jurnal Alwatzi	Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sumber Harapan Dusun	Mixed Methods (kuantitatif dan kualitatif)	Efektivitas dengan pendekatan system menurut Gibson dkk, yaitu: 1. Masukan (input); 2. Proses; 3. Keluaran (output).	Tingkat Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sumber Harapan Dusun Solor Medan yang berdasarkan tiga indikator yaitu indikator input, proses dan output hasil penelitian membuktikan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) Di Dusun Solor Medan	Penelitian ini memiliki fokus yang hampir sama dengan lokus yang berbeda. Serta terdapat perbedaan pula pada teori yang digunakan

	khoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 7 No. 2. (2021).	Solor Medan			dengan jumlah peserta penerima berjumlah 37 orang sangat efektif.	
7.	Peneliti : Alfina Saputri, Istiqomah. Jurnal : Journal Of Community Development and Disaster Management. (2023).	Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wangkelang	Kualitatif	Pengukuran efektivitas menurut Richard M.Steers, yaitu: 1. Pencapaian tujuan; 2. Integrasi; 3. Adaptasi	Berdasarkan hasil penelitian, BUMDES Berkah Sejahtera ditinjau dari pencapaian tujuan terdapat target BUMDES yang belum tercapai seperti pengembangan unit usaha, namun dari pencapaian tujuan berupa peningkatan PADES, dan memberikan bantuan sosial BUMDES Berkah Sejahtera telah efektif, dari segi integrasi BUMDES telah melakukan sosialisasi pertanggungjawaban laporan kepada BPD sebagai perwakilan masyarakat. Selanjutnya, dilihat dari penyesuaian dengan keadaan desa, BUMDES telah efektif dalam memanfaatkan potensi desa dan telah memenuhi kebutuhan air masyarakat Desa Wangkelang.	Penelitian ini memiliki fokus yang hampir sama dengan lokus yang berbeda. Serta terdapat perbedaan pula pada teori yang digunakan.

8.	Peneliti : Fitriani Syahidah, Lukmanul Hakim, Rudyk Nababan. Jurnal : NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol. 10 No. 2. (2022).	Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pusakajaya Selatan	Kualitatif	Pengukuran efektivitas program menurut Budiani (2007:53), yaitu: 1. Pemahaman program; 2. Tepat sasaran; 3. Tepat waktu; 4. Tercapainya tujuan	PKH di Desa Pusakajaya Selatan belum tepat sasaran. Hal ini disebabkan masih ditemukan data yang tidak valid sehingga terdapat KPM yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bantuan PKH ataupun sebaliknya terdapat beberapa masyarakat kurang mampu belum mendapatkan bantuan PKH. Indikator tujuan program sesuai dengan tujuan PKH yang dinyatakan dalam buku pedoman pelaksanaan PKH, dapat dikatakan belum tercapai. Indikator pemantauan program bertujuan untuk memantau pelaksanaan PKH pada sisi masukan (input) dan keluaran (output) belum berjalan baik.	Penelitian ini memiliki fokus yang hampir sama dengan lokus yang berbeda. Serta terdapat perbedaan pula pada teori yang digunakan.
9.	Peneliti : Nur Aeda, Riadul Jannah.	Implementasi dan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam	Kualitatif	Pengukuran efektivitas program menurut Budiani (2007:53), yaitu: 1. Pemahaman program;	Efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat telah membawa perubahan yang nyata kepada KPM untuk mensejahterakan keluarga.	Penelitian ini memiliki fokus yang hampir sama dengan lokus yang berbeda. Serta terdapat perbedaan pula pada teori yang

	Jurnal : Ekobisnis Vol. 8 No. 1. (2022).	Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Studi di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.		2. Tepat sasaran; 3. Tepat waktu; 4. Tercapainya tujuan		digunakan.
10.	Peneliti : Ratna Sugiyana, Dadan Kurniansyah, Mochamad Faizal Rizki. Jurnal : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6 No. 1	Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Rengasdengklok	Kualitatif	Pengukuran efektivitas program menurut Edy Sutrisno (2010:125-126), yaitu: 1. Pemahaman program 2. Tepat sasaran 3. Tepat waktu 4. Tercapainya tujuan 5. Perubahan Nyata	Kesimpulan yang peneliti dapatkan adalah Program Keluarga Harapan ini masih belum berjalan dengan efektif. Karena program ini hanya berhasil membantu Keluarga penerima Manfaat untuk mengurangi beban pengeluaran saja dan merubah pola pikir KPM dengankewajiban yang harus dijalankan tersebut tetapi tidak membantu banyak dalam peningkatan ekonomi. Jika komponen sudah habis maka bantuan tersebut akan dihentikan walaupun keluarga tersebut belum sejahtera.	Penelitian ini memiliki fokus yang hampir sama dengan lokus yang berbeda. Serta terdapat perbedaan pula pada teori yang digunakan.

1.5.2 Administrasi Publik

Dalam pengertian sempit administrasi dikatakan oleh Soewarno Handayani (1988), Administrasi berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan, ringkasan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Definisi administrasi dalam pengertian luas menurut Herbert A. Simon (1992) adalah administrasi sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut White (1958), administrasi publik terdiri dari semua operasi yang bertujuan untuk memenuhi atau menegakkan kebijakan publik. Henry (2004); Pasolong (2014:8) mengatakan bahwa :

“Administrasi publik merupakan perpaduan yang kompleks antara teori dan praktik yang tujuannya adalah untuk mengiklankan suatu pengertian terhadap pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat yang melaksanakan perintah. Administrasi publik juga meningkatkan respon kebijakan publik dengan tujuan pemenuhan kebutuhan sosial.”

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma menjabarkan konsep yang diterapkan para ahli dalam memaparkan suatu kondisi akan perkembangan suatu ilmu pengetahuan atau sudut pandang ilmu pengetahuan dengan tujuan melakukan analisis suatu peristiwa sosial yang tengah berkembang di masyarakat. Enam Paradigma administrasi publik dipaparkan seperti berikut :

Paradigma 1 (1900-1926) atau yang lebih dikenal dengan paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Tokoh-tokoh yang terlibat di dalam

paradigma ini ialah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow, melalui karya yang mereka tulis dengan judul “*politics and participation*” (1990). Melalui karya tersebut, Goodnow & White (1990) memaparkan bahwa, “Sesuat politik harus berfokus pada kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan administrasi akan mengamati pengimplementasian kebijakan tersebut.” Adanya penggolongan antara politik dan administrasi menjadikan penggolongan juga di dalam pemerintah menjadi badan legislatif yang bertujuan menyalurkan kehendak rakyat, badan eksekutif yang merupakan badan yang akan menjalankan kehendak tersebut, dan badan yudikatif akan menyokong badan legislatif dalam pembentukan sebuah kebijakan sehingga selaras dengan tujuan akan rancangan kebijakan.

Paradigma tersebut mengimplementasikan sisi pandang administrasi publik merupakan nilai yang bebas dan terarah pada tujuan akan efisiensi dan ekonomi dari government bureaucracy. Kendalanya adalah paradigma ini berfokus pada aspek lokus saja yaitu *government bureaucracy*, sehingga metode pengembangannya tidak dipaparkan secara terperinci.

Paradigma 2 (1927-1937) lebih dikenal sebagai paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Willoughby, Gullick & Urwick merupakan tokoh yang memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting* dan *Budgeting*) yang bersifat universal. Perbedaan paradigma ini dengan paradigma I adalah fokus dan lokus dari administrasi publik. Pada paradigma ini terpaparkan

fokus administrasi publik yang merupakan fungsi serta prinsip manajemen, sedangkan pemaparan lokus tidak terpapar secara rinci sehingga paradigma ini seakan menyatakan keberagaman fokus. Penerapan paradigma ini menjadi menekankan nilai fokus dibandingkan dengan nilai lokus.

Paradigma 3 (1950-1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Morstein-Marx seorang editor buku "*Elements of Public Administration*" di tahun 1946 mengajukan pertanyaannya akan kemustahilan pemisahan politik dan administrasi. Herbert Simon melayangkan sebuah kritikan mengenai berubahnya prinsip dari administrasi sehingga prinsip tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebuah prinsip universal. Adanya perdebatan antara argumen dalam hal *value-free administration* di satu pihak dengan argumen *value laden politics* di lain pihak. Pada faktanya, kedua argumen tersebut sama-sama berlaku. Perihal fakta tersebut kemudian John Gaus mencetuskan teori administrasi publik yang merupakan teori dari politik. Melalui paradigma inilah yang kemudian menjadikan administrasi publik sebagai suatu ilmu politik yang memiliki lokus pada birokrasi pemerintahan dan sifat fokus yang abstrak karena prinsip dari administrasi publik memiliki banyak kekurangan. Hilangnya identitas pada prinsip administrasi publik yang kemudian menjadikan ketidakdisiplinan kedua belah pihak atau saling mendominasi sehingga menjadi suatu kelemahan di dalam lingkup administrasi publik. Paradigma ini menyatakan kaitan erat antara administrasi publik dengan politik, terlihat pada fokus administrasi publik yang abstrak karena imbas dari dominannya disiplin politik dengan

prinsip administrasi. Birokrasi pemerintah-lah yang kemudian menjadi lokus dalam paradigma ini.

Paradigma 4 (1956-1970) ialah Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi. Paradigma ini hanya mengembangkan prinsip yang pernah populer sebelumnya. Fokus di dalam paradigma ini mengarah pada perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi dan sebagainya. Perkembangan paradigma ini memiliki dua arah yaitu perkembangan di dalam ilmu administrasi secara murni yang diperkuat dengan disiplin psikologi sosial serta orientasi di dalam kebijakan publik. Fokus yang dikembangkannya dinyatakan fleksibel karena dapat diorientasikan ke lingkup administrasi publik yang menyebabkan lokusnya menjadi abstrak.

Paradigma 5 (1970-sekarang) merupakan paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara yang titik fokus dan lokusnya telah tergambar dengan jelas. Fokus paradigma ini ialah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya ialah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik. Perbedaan paradigma ini dengan beberapa paradigma sebelumnya terletak pada kejelasan fokus dan lokusnya.

Paradigma 6 (1990-sekarang) merupakan paradigma *Governance*. Paradigma keenam menjadi suatu paradigma yang terbaru berdasarkan proses perkembangan ilmu administrasi publik yang tersusun atas

serangkaian paradigma yang telah dikemukakan sebelumnya. Pandji Santosa dalam bukunya “Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi *Good Governance*” memaparkan pilar di dalam paradigma ini yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal inilah yang kemudian membedakan antara paradigma ini dengan paradigma yang lain yaitu pemaparan akan *government* yang merupakan penyelenggara pemerintahan. Dengan adanya pergantian dari *government* ke arah *governance* yang merincikan perihal perpaduan di dalam stabilitas pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakatmadani (*civil society*), sehingga arah perkembangan paradigma ini menuju pada pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penelitian ini termasuk dalam paradigma 6 yaitu paradigma *Governance*. Paradigma *governance* membahas tentang bagaimana negara memiliki tugas memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat untuk mencapai tujuan kepuasan masyarakat kepada pemerintah. Paradigma ini membahas tentang perkembangan pemerintahan ke arah pemerintah yang baik (*good governance*) dengan memberikan pelayanan publik yang baik dan meningkatkan kinerja para pegawai untuk mencapai kepuasan masyarakat selaku pengguna pelayanan publik.

1.5.4 Manajemen Publik

Menurut Terry (2005); Hasibuan (2012), manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan pengarahan suatu kelompok ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Sedangkan menurut Ghofur (2014) mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Menurut George R. Terry, manajemen mempunyai fungsi-fungsi diantaranya sebagai perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), pengawasan/pengendalian (*controlling*) atau yang lebih dikenal dengan singkatan POAC.

Tabel 1.6 Fungsi-fungsi Manajemen Menurut G. Terry

Perencanaan (<i>planning</i>)	Perencanaan merupakan proses awal yang dijalankan untuk merumuskan tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Perencanaan disusun dengan sangat sistematis, segala yang direncanakan harus dapat diukur tingkat pencapaiannya, memuat penentuan estimasi waktu pelaksanaan suatu rencana, rencana logis dan dengan nyata dapat diperkirakan akan mampu untuk diwujudkan.
Pengorganisasian (<i>organizing</i>)	Pengorganisasian merupakan tahapan lanjutan dari proses perencanaan dengan melakukan rangkaian kegiatan pembagian atau pengaturan pekerjaan dan aspek-aspek lainnya yang terkait dalam upaya mewujudkan tujuan yang diinginkan.
Pengarahan (<i>actuating</i>)	Pengarahan adalah proses memotivasi agar para sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dapat digerakkan untuk bekerja secara maksimal sesuai dengan perencanaan dan arahan yang didapatkan saat proses pengorganisasian.
Pengawasan (<i>controlling</i>)	Pengawasan adalah tahapan yang dilakukan untuk memastikan standar kualitas pekerjaan dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan di awal.

Shafritz, et al. (1991) berpendapat bahwa dalam tahun 1990-an manajemen publik mengalami transisi dengan beberapa indikator terpenting yang akan sangat menantang yaitu :

1. Manajemen publik sebagai privatisasi suatu alternatif bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik;
2. Manajemen publik sebagai rasionalitas dan akuntabilitas;
3. Manajemen publik sebagai perencanaan dan kontrol;
4. Manajemen publik sebagai keuangan dan penganggaran;
5. Manajemen publik sebagai produktivitas sumber daya manusia

1.5.5 Efektivitas

Istilah efektivitas atau keefektifan merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris “*effectifines*” yang diartikan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu keberhasilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai suatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya) dan dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti berlaku (tentang Undang-Undang/Peraturan). Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Stress (1985:87) mengemukakan bahwa:

“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu sendiri serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Mahmudi (2005) menyatakan bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program atau kegiatan yang bernilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Sedangkan Menurut Wijaya (2000) berpendapat efektivitas merupakan suatu program pengembangan manajemen yang pada dasarnya dilakukan dengan membandingkan sasaran dan tujuan program yang dapat dicapai.

1.5.6 Program

Definisi program termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa :
“Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satuatau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran ataukegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

Arikunto (2014) menambahkan bahwa program merupakan suatu sistem, dimana rangkaian kegiatan dilaksanakan tidak hanya satu kali namun berkesinambungan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa program merupakan sederetan kegiatan yang dilaksanakan lebih dari satu kali namun berkesinambungan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Moekijat (2004:442) menyatakan:

“Program adalah suatu rencana yang luas yang mengandung penggunaan sumber daya yang berlainan untuk waktu yang akan datang dalam suatu pola yang disatukan dan menentukan suatu uraian kegiatan-kegiatan dan rencana-rencana waktu yang diperlukan masing-masing sumber, guna mencapai tujuan-tujuan yangtelah ditetapkan”.

Selanjutnya Tjokroamidjojo (2001) menyatakan bahwa suatu program yang dapat dianggap baik seringkali mempunyai unsur inovatif (pembaharuan).

Menurut Sharpe; Reynolds (1998); Rogers (2000); Rogers et al. (2000); Sedani & Sechrest (1999) bahwa pemodelan teori program menggunakan tiga komponen untuk menggambarkan program: kegiatan program atau masukan, hasil atau keluaran yang diinginkan, dan mekanisme hasil yang diharapkan tercapai. Terdapat empat unsur pokok untuk dapat dikategorikan sebagai program, yaitu:

- 1) Kegiatan yang direncanakan atau dirancang dengan seksama. Bukan asal rancangan tetapi rancangan kegiatan yang disusun dengan pemikiran yang cerdas dan cermat.
- 2) Kegiatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain, dengan kata lain ada keterkaitan antar kegiatan sebelum dengan kegiatan sesudahnya.
- 3) Kegiatan tersebut berlangsung dalam sebuah organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi non formal bukan kegiatan individual.
- 4) Kegiatan tersebut dalam implementasi atau pelaksanaannya melibatkan banyak orang, bukan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan tanpa ada kaitannya dengan kegiatan orang lain.

1.5.7 Mengukur Efektivitas Program

Makmur (2015) menyatakan terkait efektivitas program merupakan sebuah kegiatan yang pelaksanaannya menunjukkan adanya ketepatan antara harapan yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Hal ini dapat dibuktikan dengan dengan ketepatan harapan, kebijakan, dan hasil yang diperoleh. Efektivitas program ditujukan kepada ketepatan penggunaan seluruh sumber daya dalam rangka pelaksanaan suatu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, begitu pula dengan efektivitas Program Keluarga Harapan.

Ukuran efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana program berjalan, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Budiani (2007) efektivitas program dapat dilihat, sebagai berikut:

- 1) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat.
- 3) Tujuan program, yaitu kemampuan responden dalam mengetahui tujuan dilaksanakannya program. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan mengenai tujuan suatu program dapat dimengerti oleh masyarakat.

- 4) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan pada saat atau setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Sedangkan pengukuran efektivitas program menurut Edy Sutrisno (2007), yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemahaman Program, yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat memahami program. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Dengan memperhatikan kelompok sasaran maka suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak.
- 2) Tepat Sasaran, yaitu bagaimana program yang dirancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran atau sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.
- 3) Tepat Waktu, yaitu untuk penggunaan waktu dalam pelaksanaan program, harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan waktu yang tepat maka program akan berjalan efektif.
- 4) Tercapainya Tujuan, yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari dibentuknya program sudah tercapai atau belum.
- 5) Perubahan Nyata, yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Sehingga dapat diukur melalui sejauh mana program tersebut

memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat.

Menurut Siagian dalam S.P. Siagian mengemukakan ukuran efektivitas program meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, yaitu penentuan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya;
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, yaitu strategi serta kebijakan yang ditentukan harus mampu menjembatani tujuan yang ditetapkan dengan usaha-usaha kegiatan operasional;
- 4) Perencanaan yang matang, yaitu mengambil keputusan untuk kegiatan di masa depan;
- 5) Penyusunan program yang tepat, yaitu berkaitan dengan pedoman untuk bertindak;
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana, hal ini berguna dalam menunjang pelaksanaan program;
- 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bila program tidak dilakukan secara efektif dan efisien maka tujuan pun tidak akan tercapai;
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian, yaitu dilakukan untuk mengatur dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan

dalam pelaksanaan program. (S.P. Siagian, 1978).

Dalam menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, berdasarkan identifikasi masalah yang ada pada Kelurahan Cipinang Besar Selatan, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edy Sutrisno, yaitu:

1. Pemahaman program
2. Tepat sasaran
3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan
5. Perubahan nyata

1.5.8 Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Program

Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondineli (Dalam Mutiarin Dyah Dan Zaenudin Arif, 2014) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu program adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Lingkungan

Elemen sistem dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu program yang mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program. Menurut Haedar Akib terdapat faktor yang mempengaruhi proses implementasi, yaitu faktor kebijakan dan faktor di luar kebijakan. Menurut Keban (dalam Akib,

2010) faktor diluar kebijakan terdiri dari kondisi sosial ekonomi dan teknologi, sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok, dukungan dari pejabat atasan, dan komitmen kepemimpinan pelaksana.

2. Sumber Daya

Sumber pendukung baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia pada pelaksanaan suatu program . Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Zaenal, 2017) sumber daya terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

3. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Mencakup struktur organisasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang akan mempengaruhi suatu program.

Donald P.Warwieck, (1988) mengatakan bahwa dalam tahap implemetasi program terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek yaitu:

1. Faktor pendorong (*Facilitating conditions*)
2. Komitmen pimpinan politik
3. Kemampuan organisasi
4. Komitmen para pelaksana (Implementer)
5. Dukungan dari kelompok kepentingan

6. Faktor penghambat (*Impeding conditions*)
7. Banyaknya pemain (actor) yang terlibat
8. Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda
9. Kerumitan yang melekat pada program itu sendiri
10. Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak .

Faktor lain: Waktu dan perubahan kepemimpinan

Berdasarkan beberapa faktor yang diungkapkan oleh para ahli, penelitian ini menggunakan teori Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondineli (Dalam Mutiarin Dyah Dan Zaenudin Arif, 2014) sebagai indikator dalam menentukan faktor pendukung dan penghambat efektivitas program Keluarga Harapan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kota Jakarta Timur. Hal ini dikarenakan faktor lingkungan, sumber daya, serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana sangat berpengaruh dalam keberjalanan program tersebut.

1.5.9 Kesejahteraan Masyarakat

Segel & Bruzy (dalam Kusnadi, 2013) mengatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Midgley (dalam Sutomo, 2006) memperjelas bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun atas tiga unsur yaitu: Pertama, setinggi apa masalah sosial dikendalikan, Kedua, seluas apa

kebutuhan dipenuhi, dan Ketiga, setinggi apa kesempatan bagi individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat.

Menurut Suryant dan Susilowati, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan, dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya dengan tingkat batas tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan individu secara obyektif. Pilihan yang dilakukan individu sebagai uji yang obyektif adalah membandingkann kesejahteraan individu pada situasi yang berbeda. Kesejahteraan sosial merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat.

Menururt World Bank, tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat diamati melalui dimensi pengurangan kemiskinan (*increase in property*), peningkatan kemampuan baca tulis (*increase in literacy*), penurunan tingkat kematian bayi (*increase il infant mortality*), peningkatan harapan hidup (*life expentancy*), dan penurunan dalam ketimpangan pendapatan (*decrease income inequality*).

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator, diantaranya:

- a. Rasa aman (*security*)
- b. Kesejahteraan (*welfare*)
- c. Kebebasan (*freedom*)
- d. Jati diri (*identity*)

Menurut Kolle kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya.
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

1.5.10 Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) tidaklah sama dan bukan pula lanjutan Program Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah

berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin untuk mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM.

Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial penduduk miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen persyaratan sebagai peserta PKH yang telah ditetapkan.

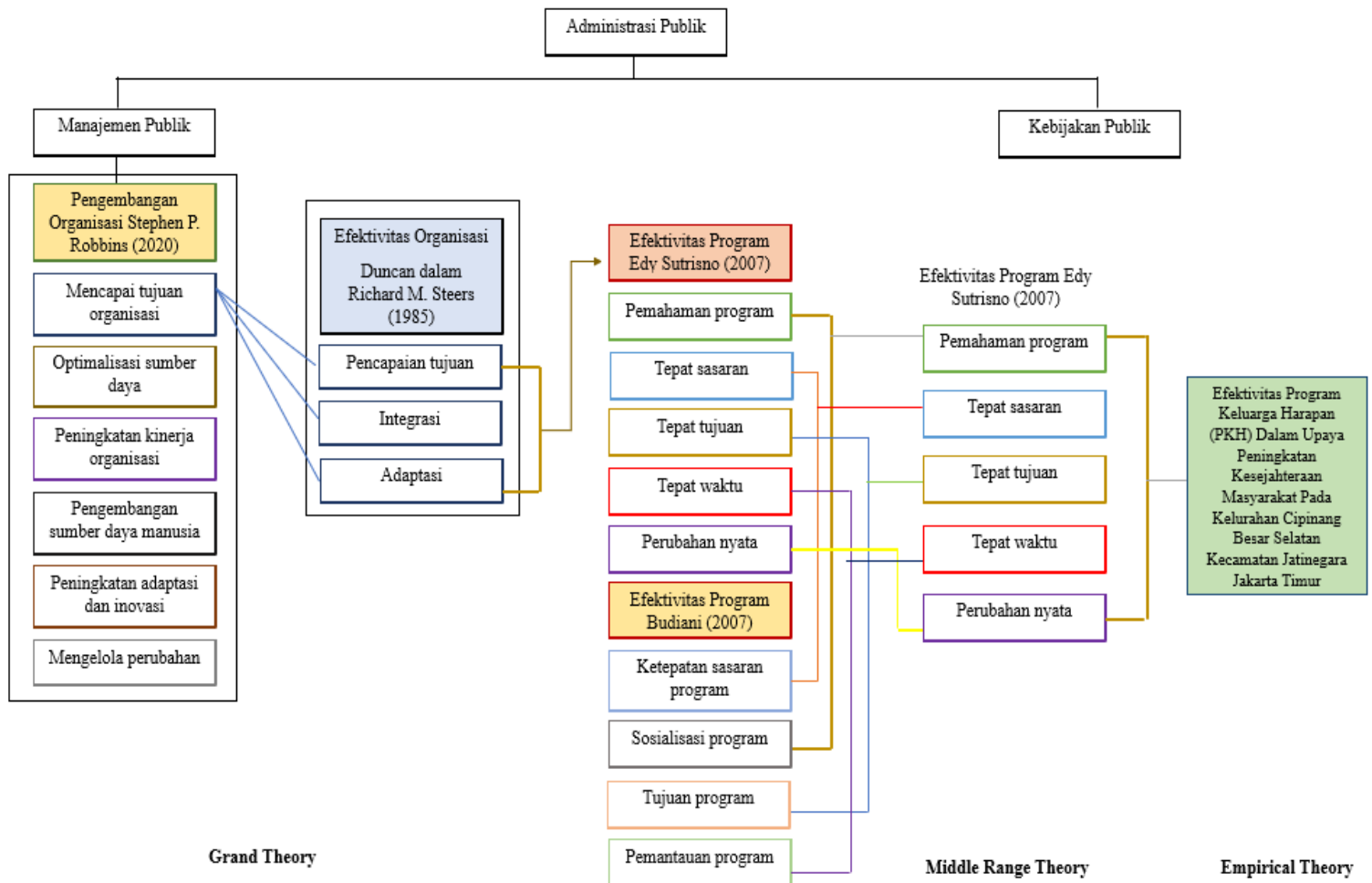
Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah.

PKH memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kesehatan dan pendidikan disekitarnya terutama anak balita. Manfaat PKH juga mulai diberlakukan untuk

penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, Keluarga Miskin diarahkan untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan PKH diarahkan untuk menjadi pusat keunggulan dalam penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

1.5.11 Kerangka Penelitian



Gambar 1.4 Kerangka Penelitian

Sumber : diolah peneliti

1.6 Operasionalisasi Konsep

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat dalam pendekatan keluarga. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sekaligus upaya untuk memutus rantai kemiskinan, salah satunya di wilayah Jakarta Timur. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Edy Sutrisno (2010) dalam mengukur efektivitas program keluarga harapan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kota Jakarta Timur.

1. Pemahaman Program

yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat memahami program. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Pemahaman program kepada masyarakat dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi maupun komunikasi mengenai Program Keluarga Harapan. Dalam penelitian ini, program Keluarga Harapan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan akan mencapai efektivitasnya apabila para pihak terkait memiliki pemahaman yang matang mengenai:

- 1) Pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pendamping PKH terhadap ketentuan program PKH, dilihat dari prosedur dan mekanisme pendaftaran, kegiatan, dan besar nominal serta syarat penggunaan dana bantuan
- 2) Kesadaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta pendamping PKH terhadap tujuan dan manfaat program PKH
- 3) Tanggung jawab Keluarga Penerima Manfaat serta pendamping PKH dalam penyelenggaraan program PKH
- 4) Komunikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta pendamping PKH mencakup pengaduan, keluhan, maupun permasalahan yang dialami dalam penyelenggaraan program PKH

2. Tepat Sasaran

yaitu bagaimana program yang dirancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran atau sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pada penelitian ini, tepat sasaran yang dimaksud adalah penerima yang dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berdomisili di sekitar Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ukuran efektivitas terkait ketepatan sasaran dapat diamati dengan melihat gejala-gejala sebagai berikut:

- 1) Memiliki komponen kesehatan yaitu anak dengan berusia dibawah 6 (enam) tahun, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang.

- 2) Memiliki komponen Pendidikan usia sekolah 6 (enam) hingga 21 (dua puluh satu) tahun untuk peserta Pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTS sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat. Termasuk penyandang disabilitas ringan/sedang.
- 3) Memiliki komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

3. Tepat Waktu

yaitu untuk penggunaan waktu dalam pelaksanaan program, harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan waktu yang tepat maka program akan berjalan efektif. Pada penelitian ini, penggunaan aspek waktu dimaksudkan dalam pelaksanaan pencairan dan penyaluran dana bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masing-masing peran *stakeholders* harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan, sehingga dalam pencairan bantuan sosial, khususnya dalam Program Keluarga Harapan dapat tersalurkan tepat waktu. Pemberian bantuan yang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan menjadi tolok ukur program tersebut akan lebih efektif.

4. Tercapainya Tujuan

yaitu merupakan capaian dari suatu sasaran dan target yang diselenggarakan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan, sehingga memberikan arahan terkait sasaran yang ingin dicapai. Tercapainya suatu tujuan dapat

dilihat berdasarkan perbandingan antara *input* dan *output* yang dihasilkan. Selain itu indikator tercapainya tujuan suatu program juga dapat dilihat dari kinerja implementor dari Program Keluarga Harapan. Pada penelitian ini, untuk mengetahui tercapainya tujuan dari program PKH di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, gejala yang dapat diamati yaitu:

- 1) Meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat

5. Perubahan Nyata

yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Sehingga dapat diukur melalui sejauh mana program tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, gejala-gejala yang dapat dilihat yaitu:

- 1) Tingkat kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Kelurahan Cipinang Besar Selatan setelah adanya Program Keluarga Harapan, dilihat dari terpenuhinya kebutuhan sehari-hari
- 2) Kondisi kemiskinan di wilayah Kelurahan Cipinang Besar Selatan setelah adanya Program Keluarga Harapan

Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Dalam Mutiarin Dyah Dan Zaenudin Arif, 2014) digunakan untuk melihat faktor pendukung dan penghambat efektivitas program keluarga harapan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kota Jakarta Timur yang terdiri beberapa indikator, antara lain:

1. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan dapat berasal dari budaya, kondisi ekonomi, kondisi sosial, hukum dan kondisi geografis. Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan dipengaruhi oleh kondisi budaya, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam sebuah program/kebijakan tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang mendukung keberhasilan suatu program. Pada penelitian ini, sumber daya terdiri dari sumber daya manusia meliputi pemerintah, masyarakat, dan pendamping PKH.

Sedangkan sumber daya pendukung keberhasilan program

lainnya yaitu sumber daya finansial meliputi penyaluran bantuan anggaran serta kemampuan daya serap anggaran).

3. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Para pelaksana program ini harus memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang yang sesuai dengan program. Pada penelitian ini, sumber daya manusia yang terlibat, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pendamping PKH harus memiliki kemampuan serta kompetensi seperti:

- Pemerintah menjadi fasilitator dalam penyaluran bantuan non tunai kepada masyarakat yang terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang diperuntukkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan setiap bulan dengan fokus utama di bidang ekonomi, pendidikan anak, kesehatan, dan perlindungan anak.
- Peran pendamping PKH terdiri dari keterampilan fasilitatif, keterampilan mendidik, dan keterampilan representasi/perwakilan masyarakat

1.7 Argumen Penelitian

Kemiskinan merupakan permasalahan paling krusial di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan sehingga tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan Masyarakat di negara-negara maju. Tak terkecuali di DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebanyak 501,92 ribu jiwa, pada tahun 2022 sebanyak 502,04 ribu jiwa, dan pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta sebanyak 477,83 ribu jiwa.

Upaya meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya permasalahan kemiskinan yang terus menerus bertambah setiap harinya maka Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan ditetapkan datanya oleh pemerintah. Diketahui bahwa Kelurahan Cipinang Besar Selatan merupakan salah satu kelurahan yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Kota DKI Jakarta. Dengan adanya pelaksanaan PKH di Kelurahan Cipinang Besar Selatan diharapkan dapat memberikan hasil yang positif dalam menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah diterapkan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Cipinang Besar Selatan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Berkaitan dengan judul maka untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas program, maka pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas dengan menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta. Metode kualitatif ini disebut juga metode artistik, karena dalam proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola) dan disebut sebagai metode *interpretive* dikarenakan data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasinya terhadap data yang ditemukan dilapangan (Sugiyono 2014).

Tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada (Arikunto, Suharsimi 2005).

Penelitian deskriptif ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi pendekatan ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu gejala, variabel, atau keadaan yaitu keadaan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan ini menggunakan penelitian deskriptif.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi atau tempat penelitian itu dilakukan. Informasi-informasi terkait untuk data yang diperlukan dapat ditemukan di situs penelitian (Wiratna Sujarwene 2014). Lokus yang dipilih dalam

penelitian ini adalah Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur. Lokasi penelitian yang ditetapkan ditunjukkan dalam rangka memberikan batasan ruang lingkup penelitian dengan fokus pada fenomena yang terjadi.

1.8.3 Subyek Penelitian

Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penentuan subjek penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *simple random sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010:300). Informan yang dimaksud adalah:

Tabel 1.7 Informan PKH

Narasumber	Keterangan	Teknik
Informan 1	Koordinator PKH Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur	<i>Purposive sampling</i>
Informan 2	Koordinator PKH Tingkat Kecamatan Jatinegara	<i>Purposive sampling</i>
Informan 3	Pendamping Sosial PKH Kelurahan Cipinang Besar Selatan	<i>Purposive sampling</i>

Teknik sampling menggunakan metode *simple random sampling* merupakan teknik penentuan lokasi dan sampel secara acak dengan menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, memberikan nomor urut pada semua satuan sampel yang diambil serta dapat mewakili wilayah penelitian dalam pengambilan sampel secara keseluruhan. Menurut Sugiyono (2012), *simple random sampling* yaitu metode yang digunakan untuk memilih

sampel dari populasi secara acak sederhana sehingga setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama besar untuk diambil sebagai sampel. Seluruh anggota populasi menjadi anggota dari kerangka sampel. Metode ini biasa digunakan jika populasi bersifat homogen. Cara pengambilan sampel dapat dilakukan secara acak, yaitu memilih individu sampel dan lokasi yang akan digunakan secara acak untuk mewakili populasi dan wilayah secara keseluruhan.

Narasumber	Keterangan	Teknik
Informan 4	Masyarakat Keluarga Penerima Manfaat bantuan PKH	<i>Simple Random sampling</i>
Informan 5	Masyarakat Keluarga Penerima Manfaat bantuan PKH	<i>Simple Random sampling</i>
Informan 6	Masyarakat Keluarga Penerima Manfaat bantuan PKH	<i>Simple Random sampling</i>

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian adalah menggunakan data kualitatif yang meliputi tata letak geografis, objek, data profil informan yang terlibat, proses penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, efektivitas program PKH yang dilakukan, serta faktor penghambat keberlangsungan penerapan Program Keluarga Harapan (PKH).

1.8.5 Sumber Data

Pengertian sumber data menurut Zulfadrial (2012:46) adalah “subjek dari mana data dapat diperoleh”. Menurut Lofland (Moleong, 2012,Hlm.157) “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain.” Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013:142) sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat di muka. Sesuai dengan sumber data, maka dikelompokkan menjadi:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci. Indriantoro dan Supomo dalam Purhantara (2010:79).
2. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data. (Moehar, 2002:113). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224), teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data merupakan tahap yang paling menentukan didalam pelaksanaan penelitian ini. Untuk memperoleh data yang valid dan juga relevan di lapangan maka harus didukung oleh prosedur pengumpulan data yang benar. Maka digunakan teknik antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan *interview guide* (pedoman wawancara) yang pokok kemudian pertanyaan dikembangkan seiring atau sambil bertanya setelah informan tersebut menjawab, sehingga terjadi wawancara interaktif antara peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan dengan dicatat atau direkam sehingga data yang diperoleh dapat dikonfirmasi kembali.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Pengumpulan data pencatatan terhadap objek dilakukan di tempat berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti

berada bersama objek yang sedang diteliti atau diamati. Dalam penelitian ini peneliti mengamati ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda atau alat-alat, waktu dan peristiwa.

3. Dokumentasi

Adalah suatu cara untuk memperoleh data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2016). Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014: 246-253) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Teknik analisis data ini difokuskan untuk mengolah data-data yang diperoleh peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara serta dokumentasi yang ada hubungannya dengan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya menyejahterakan masyarakat.

Setelah data terkumpul, langkah yang selanjutnya diambil peneliti di dalam penelitian ini yaitu melakukan kegiatan proses analisis data. Hal ini ditujukan untuk memilih data-data yang telah terkumpul pada saat penelitian

ini dilaksanakan. Miles & Huberman (1992), mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Adanya proses reduksi ini diharapkan dapat menjadikan data yang lebih tajam dan jelas, sehingga memudahkan tahapan analisis data selanjutnya. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan atau terusmenerus sampai laporan akhir tersusun dengan lengkap.

2. Display Data

Dalam penelitian ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi sesuatu yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Adapun langkah kedua dari kegiatan analisis data ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya.

Setelah mereduksi data sesuai dengan hal - hal pokok yang difokuskan pada permasalahan yang ingin dikaji, tahap selanjutnya peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk narasi. Artinya, setiap fakta dan informasi yang didapatkan, yang terjadi atau ditemukan peneliti, kemudian dinarasikan dan diberikan interpretasi terhadap fenomena-fenomena tersebut. Penyajian data dilakukan agar data hasil

reduksi terorganisirkan memberikan pemahaman kepada peneliti mengenai fenomena selanjutnya, setelah itu peneliti merencanakan langkah selanjutnya yang harus diambil berdasarkan pemaknaan terhadap fenomena tersebut. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun dan menyajikan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.

3. Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir analisis data yang digunakan untuk melihat hasil reduksi dan tetap mengacu pada rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Langkah selanjutnya adalah verifikasi data, seperti yang dijelaskan tersebut bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti- bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan.

Setelah data disajikan dan diverifikasi dalam bentuk narasi berdasarkan pemaknaan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, langkah peneliti selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan pemaparan data tersebut. Penyimpulan data yang diajukan sesuai fokus masalah sekaligus sebagai temuan penelitian.

1.8.8 Kualitas Data

Data yang terkumpul dilakukan pengabsahan data melalui pengecekan dengan triangulasi (bukti dalam melakukan pengamatan yang melibatkan unsur peneliti, metode dan obyek yang diteliti) sesuai pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data bersangkutan untuk

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama dan mana yang berbeda. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dari hasil wawancara dengan membandingkan pandangan umum yang diperoleh di lapangan dengan apa yang dikatakan oleh informan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji kredibilitas dari suatu data yang diperoleh melalui pengecekan data dengan sumber yang sama namun tekniknya berbeda. Contohnya ketika data dari hasil wawancara, lalu dicek dengan proses observasi maupun dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu, perubahan suatu proses dan perilaku manusia cenderung berubah-ubah berdasarkan rentang waktu yang berbeda. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi, maka proses pengamatan

penelitian dilakukan lebih dari satu kali proses pengamatan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas data yaitu triangulasi sumber, artinya peneliti bukan hanya mencari sumber informasi melalui mewawancarai satu informan saja, tetapi melaksanakan wawancara dengan orang yang berbeda tetapi masih sesuai dengan kriteria informan yang akan di wawancarai guna memperoleh informasi yang benar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Misalnya peneliti menggali tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, selanjutnya peneliti membandingkan dengan jawaban dari pelaksana PKH dan masyarakat (KPM) jika terdapat perbedaan, maka peneliti terus menggali data dari sumber lain seperti tokoh masyarakat dan masyarakat non-PKH di wilayah Kelurahan Cipinang Besar Selatan.